

## Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Yusriwarti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indragiri, [yusriwarti9@gmail.com](mailto:yusriwarti9@gmail.com)

\*Corresponding Author: [yusriwarti9@gmail.com](mailto:yusriwarti9@gmail.com)

---

### Info Artikel

Diterima, 04-09- 2021

Direvisi, 10-09- 2021

Dipublikasi, 29-10-2021

---

### Kata Kunci:

Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

---

### Keywords:

*Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Report, Accountability of Regional Financial Management*

---

### Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Menguji Secara Empiris Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sampel Dalam Penelitian Ini Sebanyak 48 Responden Yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Bendahara. Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Data Primer Yaitu Dengan Menyebarkan Kuesioner Secara Langsung Kepada Responden. Penelitian Ini Menggunakan Metode Analisis Data Regresi Linear Berganda Dengan Menggunakan SPSS Versi 26. Hasil Uji Hipotesa Secara Parsial Menunjukkan Bahwa Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil Uji Hipotesa Secara Simultan Yaitu Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai Koefisien Determinasi Sebesar 59.5% Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dipengaruhi Oleh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sedangkan Sisanya 40.5% Dipengaruhi Oleh Variabel Lain Yang Tidak Diteliti Dalam Penelitian Ini.

---

### Abstract

*This Research Aims To Know And Empirically Test The Effect Of Financial Statement Presentation And Accessibility Of Financial Statements To Accountability Of Regional Financial Management Indragiri Hilir Regency. The sample in this study was 48 respondents, namely the head of the sub-division of finance and the treasurer. Data Collection Techniques Using Primary Data That Is By Distributing Questionnaires Directly To Respondents. This Research Uses Multiple Linear Regression Data Analysis Method Using SPSS Version 26. Partial Hypothesis Testing Results Show That Financial Statement Presentation Affects Regional Management Accountability in Indragiri Hilir Regency and Accessibility of Financial Reports Affects Regional Financial Management Accountability in Indragiri Hilir Regency. Results of Simultaneous Hypothesis Testing, namely Presentation of Financial Statements and Accessibility of Financial Statements Simultaneously Affect the Accountability of Regional Financial Management in Indragiri Hilir Regency. The Coefficient of Determination Value of 59.5% Regional Financial Management Accountability of Indragiri Hilir Regency is Influenced by the Presentation of Financial Statements and Accessibility of Financial Statements, while the remaining 40.5% is Influenced by Other Variables Not Examined In This Research.*

## PENDAHULUAN

Di zaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintah mampu mengelola otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Perkembangan teknologi saat ini juga menuntut pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut. Masyarakat sebagai pihak pemberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan di dalam suatu instansi dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan, sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP nomor 12 Tahun 2019). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan (Nurlaili, 2016)

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Penyajian Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah, yang paling bertanggungjawab atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah Gubernur/Bupati/Walikota. Namun, perlu untuk dipahami bahwa LKPD merupakan output dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD, sehingga untuk menguraikan secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD. (Dewi,2018)

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri

dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas yang efektif juga tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Sehingga pemerintah selain menyajikan laporan keuangan juga harus memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan fasilitas kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan agar mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Fauziyah, 2018).

Fenomena di sektor public meningkatkan perhatian masyarakat terhadap masalah transparansi dan aksesibilitas pengelolaan keuangan. Dimana masyarakat berharap adanya pelaksanaan pemerintah yang baik, sehingga setiap kebijakan pemerintah di tuntut untuk transparan agar pemerintah yang bersih dapat di wujudkan demi tercapainya kehidupan yang adil dan sejahtera merata bagi masyarakat.

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Pernyataan pemerintah yang dimuat dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah, pasal 103 dinyatakan bahwa data terbuka yang dapat diketahui, informasi yang diakses dan diperoleh oleh masyarakat dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Dewi (2018), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang kurang baik akan mendorong penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan semakin tingginya tingkat aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari fenomena yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Alasan penulis memilih judul ini karena adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai objek penelitian karena peneliti ingin mengetahui seberapa baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyajikan laporan keuangan, peneliti juga ingin mengetahui seberapa mudahnya akses laporan keuangan daerah bagi masyarakat umum dan juga untuk mengetahui seakuntabel apa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau selama 4 tahun berturut-turut sejak 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka di rumuskan masalah sebagai berikut : Apakah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?. dan tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan manfaat yang di diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis. (2) Manfaat Praktis dalam penelitian ini yaitu, diharapkan mampu memberikan gambaran pada Organisasi Perangkat Daerah bagaimana penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi telah dipraktekan secara luas baik dalam sektor privat maupun sektor publik. Teori agensi muncul karena keberadaan hubungan antara agen (pihak yang menerima wewenang) dan prinsipal (pihak yang memberi wewenang). Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan masalah terjadinya ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibanding dengan prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dengan adanya *corporate governance* masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen dapat dimonitor dengan memperhatikan praktik good corporate governance adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Dilihat dari sudut pandang pemerintah, masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya (*self interest*) yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya dimata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga kemampuan untuk membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (Dewi, 2018).

### Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari akuntabilitas. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : (1) relevan (2) Andal (3) Dpat dibandingkan dan (4) dapat dipahami.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Mulyana (2006), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Disisi lain, Rochman (2009), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.

Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sehingga dari kesimpulan diatas selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, sehingga perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

### **Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)**

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 Tahun 2004). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan fiskal dalam membuat keputusan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan.

SIKD sebagai sebuah sistem juga pemerintah daerah harus memenuhi:

1. Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.
2. Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah
3. *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan**

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi pemerintah. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. menurut keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggung

jawaban kepada pihak yang berhak untuk meminta keterangan terhadap pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas aktivitas yang dilakukannya dalam mengelola keuangan daerah, dengan mengeluarkan output LAKIP. Pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial akan disalurkan kepada masyarakat. Baik pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Ciri-ciri pengelolaan keuangan yang akuntabel: (1) Transparansi, (2) Efisien, (3) Efektivitas, (4) Partisipasi.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 sejumlah 33 OPD (BPS Kab. Inhil). Pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Skala penelitian yang digunakan adalah skala likert. Model skala likert memudahkan responden menjawab salah satu pada masing-masing pertanyaan.

Terdapat lima alternative jawaban yang mengacu pada teknik skala likert: 1: STS ( Sangat Tidak Setuju ), 2 : TS ( Tidak Setuju ), 3 : KS (Kurang Setuju), 4 : S (Setuju), 5 : SS ( Sangat Setuju ). Selain itu, pengumpulan data dilakukan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir untuk melihat berapa jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Uji Kualitas Data yang pengukurannya menggunakan Uji Validitas dan Uji Realibilitas, metode Uji Asumsi Klasik yang pengukurannya menggunakan Uji Normalitas, uji Multikolliieritas dan metode Analisis Regresi Linear Berganda dengan persamaan Regresi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Pengambilan keputusan dalam uji validitas ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi 0.05 dari *Degree of Freedom* (df) = n-2, tersaji dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan**

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0.793	0.284	Valid
2	0.594	0.284	Valid
3	0.705	0.284	Valid
4	0.670	0.284	Valid
5	0.704	0.284	Valid
6	0.738	0.284	Valid
7	0.658	0.284	Valid
8	0.617	0.284	Valid
9	0.626	0.284	Valid

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 26), 2021*

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0.937	0.284	Valid
2	0.562	0.284	Valid
3	0.924	0.284	Valid

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 26), 2021*

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0.338	0.284	Valid
2	0.553	0.284	Valid
3	0.478	0.284	Valid
4	0.475	0.284	Valid
5	0.656	0.284	Valid
6	0.777	0.284	Valid
7	0.777	0.284	Valid
8	0.449	0.284	Valid

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 26), 2021*

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3, seluruh item pertanyaan pada variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa nilai r hitung pada setiap pertanyaan lebih besar dibandingkan dengan  $r_{\text{tabel}}$  yaitu 0.284. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk pengukuran pada setiap variabel adalah valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner penelitian (Sujarweni, 2014). Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai *Cronbach's alpha* > 0.70 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Adapun hasil dari pengujian kuesioner pada masing-masing

variabel ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Penyajian laporan keuangan	0.839	Reliabel
Aksesibilitas laporan keuangan	0.760	Reliabel
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	0.711	Reliabel

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 26), 2021*

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang pada kuesioner penelitian ini memiliki tingkat keandalan yang baik dan dapat diterima.

## Pengujian Hipotesa

### Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, hasil uji regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.610	3.282		3.232	.002
Penyajian Laporan Keuangan	.373	.080	.447	4.662	.000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.758	.135	.539	5.614	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 26), 2021*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 5, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 10.610 + 0.373X_1 + 0.758X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan diatas diketahui :

1. Konstanta sebesar 10.610 menyatakan bahwa apabila penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan bernilai sama dengan nol, maka nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 10.610.
2. Koefisien variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0.373 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan nilai penyajian laporan keuangan maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.373.
3. Koefisien variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0.758 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai aksesibilitas laporan keuangan maka akan menaikkan nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.758.

### Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial pada penelitian ini sebagaimana tersaji pada tabel 6 berikut :

**Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.610	3.282		3.232	.002
Penyajian Laporan Keuangan	.373	.080	.447	4.662	.000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.758	.135	.539	5.614	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 26), 2021*

Berdasarkan hasil uji pada tabel 6, variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai thitung sebesar 4.662 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1.679 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Sedangkan nilai signifikansi yaitu 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05. Maka H1 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai thitung sebesar 5.614 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1.679 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Sedangkan nilai signifikansi yaitu 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05. Maka H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

### Uji Simultan (Uji f)

Uji simultan atau uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji simultan dilakukan dengan membandingkan hasil  $f_{hitung}$  dengan  $f_{tabel}$ , sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	241.118	2	120.559	35.505	.000 <sup>b</sup>
	Residual	152.799	45	3.396		
	Total	393.917	47			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 26), 2021*.

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 7, menunjukkan hasil uji anova (*Analysis of Variance*) dengan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 35.505 dan  $f_{tabel}$  sebesar 3.20, sehingga  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dengan nilai signifikansi 0.00 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0.05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga H<sub>3</sub> diterima.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini tersaji pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.782 <sup>a</sup>	.612	.595	1.843
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah				

Sumber: *Data Olahan SPSS (versi 26), 2021.*

Berdasarkan tabel 8, besarnya nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.595 atau sebesar 59.5%. Hal ini berarti 59.5% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **a. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara parsial, variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4.662 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.679, yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_1$  diterima. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari daerah atas wewenang yang diberikan kepadanya, apabila proses penyajian laporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlaili (2016), yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hasil pengujian yang menemukan hasil signifikan dikarenakan semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **b. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara parsial, variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.614 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.679, yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_1$  diterima. Hasil pengujian menemukan hasil signifikan dikarenakan dengan terciptanya aksesibilitas laporan

keuangan berdampak baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah dapat mewujudkan transparansi terhadap laporan keuangan kepada masyarakat (pengguna). Sehingga pemerintah telah menciptakan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan dengan baik. Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penyebab dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena kemudahan aksesibilitas menjadikan akuntabilitas terhadap laporan keuangan daerah tersebut. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lily (2015), yang menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis membuktikan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

### c. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara simultan, variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga  $H_3$  diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 35.505 dan nilai  $f_{tabel}$  sebesar 3.20, yang artinya  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dengan signifikansi 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_3$  diterima.

Hal ini berarti bila laporan keuangan yang disajikan sesuai dan aksesibilitas laporan keuangan secara lengkap mudah didapat dan diterapkan secara bersama-sama maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik serta terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya laporan keuangan lengkap dan akses laporan keuangan yang baik dibuat pemerintah maka informasi akan laporan keuangan semakin mudah didapat, sehingga akuntabilitas laporan keuangan semakin baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang didukung oleh telaah pustaka dan data yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui secara empiris apakah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi dengan nilai Adjust R Square sebesar 0.595 atau sebesar 59.5%. Artinya, sebesar 59.5% akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas

laporan keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 40.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Hasil uji Parsial (Uji t)

- a. Variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga  $H_1$  diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai thitung sebesar 4.662 dan nilai ttabel sebesar 1.679, yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_1$  diterima.
- b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai thitung sebesar 5.614 dan nilai ttabel sebesar 1.679, yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_2$  diterima.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti menyarankan agar:

1. Agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti maka penelitian selanjutnya seharusnya memperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di beberapa kabupaten. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang memungkinkan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arumanti, Nur Rahma. 2018. *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Internal Control sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.6 No.1.
- Dewi, Amalia Citra. 2018. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.7 No.4.
- Fauziyah, Miftahul Reza. 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(6): 1-16.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Lily, 2015 *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*. Jurnal online mahasiswa Akuntansi Universitas Riau. Vol. 2 No. 2.
- Mardiasmo 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyanto DKK. 2020. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian*

- Internal Pemerintah sebagai variabel Moderating (Studi empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus)*. JBE Vol.6 No.1.
- Nurlaili, 2016. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Bengkalis)* JOM Fekon Vol.3 No.1.
- Sastra, Yuni. 2013 *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi, Universitas Negeri Medan.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D..* Alfabeta: Bandung.
- Sumiyati. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir)*. Jom Fekon, .2(2): 1-15
- Superdi. 2017. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Siunjung)*. JOM Fekom, 4(1): 2016-2029.
- Wahdina, 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung*. Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No. 1
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2015)
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah.
- <https://www.riauin.com/read-15467-2020-07-02-empat-kali-berturuturut-pemkab-inhil-sukses-raih-opini-wtp.html>